



Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kab di Wilayah Sumut

Latersia Br Gurusinga^{1*}, Fitri Handayani², Yestika Seprina Zai³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen Administrasi dan Rekayasa Teknologi, Indonesia

Latersiagurusinga76@gmail.com^{1*}, yestikazai5@gmail.com³

Alamat : Jl. Merbabu No. 32 H, Medan

Korespondensi Penulis : Latersiagurusinga76@gmail.com^{1*}

Abstract. This study aims to assess the level of effectiveness and the extent of the contribution of local taxes to the Regional Original Revenue (PAD) in cities and regencies within the North Sumatra (Sumut) region for the years 2023–2024. Regional Original Revenue refers to the income earned by a local government sourced from the potential within its own territory. Effectiveness is defined as the extent to which an organization successfully achieves its predetermined goals, while contribution refers to the proportion or percentage of PAD relative to the total regional revenue. The research employs a quantitative approach, using secondary data collected from publicly available financial reports. These data were obtained from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance at <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> and further reviewed to generate a clear and systematic description. The research population includes all cities and regencies in the North Sumatra region, with the final sample consisting of 66 data points, derived from 33 regions over a 2-year period. A descriptive quantitative method was used to analyze the data. This approach, rooted in positivist philosophy, allows for systematic observation and evaluation of existing facts based on the selected research objects. The descriptive analysis focuses on measuring the effectiveness and contribution levels of local taxes in supporting PAD. The results of the study indicate that the effectiveness of local tax collection in North Sumatra is categorized as fairly effective, with an average effectiveness rate of 84%. Furthermore, the contribution of local taxes to PAD is also considered good, with an average contribution rate of 33%. These findings suggest that local taxes play a significant role in generating regional revenue and that efforts by regional governments in North Sumatra to manage tax collection have been reasonably successful. The results also highlight the need for continued improvement to optimize local tax revenue and strengthen regional fiscal independence.

Keywords: Effectiveness, Regional Tax Contribution, Regional Original Income

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas dan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota dan kabupaten yang berada di wilayah Sumatera Utara (Sumut) selama tahun 2023–2024. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi merujuk pada proporsi atau persentase PAD terhadap total pendapatan daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Data dikumpulkan dari laporan keuangan yang tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kota dan kabupaten di wilayah Sumatera Utara, dengan jumlah sampel sebanyak 66, yang diperoleh dari 33 daerah selama dua tahun. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, yang berlandaskan pada filosofi positivisme. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah fakta-fakta empiris secara objektif berdasarkan data yang telah diperoleh. Fokus utama analisis adalah mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah serta kontribusinya terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah di wilayah Sumatera Utara berada dalam kategori cukup efektif, dengan rata-rata persentase sebesar 84%. Sementara itu, tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD juga dinilai baik, dengan rata-rata kontribusi sebesar 33%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan daerah dan bahwa pengelolaan pajak oleh pemerintah daerah di Sumut telah menunjukkan hasil yang cukup optimal. Meskipun demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

1. LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang diperoleh suatu daerah dari potensi yang ada di wilayahnya sendiri. PAD berfungsi menjadi tulang punggung utama dalam pendanaan aktivitas pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Pratama & Ismunawan, 2023)

Rasio efektivitas pajak daerah adalah suatu ukuran yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah jika dibandingkan dengan sasaran yang telah diatur dalam anggaran, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. (Dendy Setyawan, 2023)

Kontribusi pajak daerah merupakan besaran atau persentase Pajak Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Kontribusi pajak daerah dipakai untuk biaya penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang dicatat dalam rincian sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam satu tahun. (Arif Bijak Saputro & Masitoh, 2020)

Berikut merupakan tingkat ketercapaian atau realisasi dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk wilayah Sumatera Utara selama periode 2023-2024. (Jurnal et al., 2022)

Tabel 1 Tingkat Ketercapaian target

NO.	Wilayah	Tahun	
		2023	2024
1.	Kab. Asahan	91.06	83.99
2.	Kab. Dairi	99.02	129.28
3.	Kab. Deli Serdang	63.98	71.00
4.	Kab. Karo	81.74	64.42
5.	Kab. Labuhanbatu	81.65	61.77
6.	Kab. Langkat	145.05	71.44
7.	Kab. Mandailing Natal	105.24	95.30
8.	Kab. Nias	141.38	90.06
9.	Kab. Simalungun	75.82	119.84
10.	Kab. Tapanuli Selatan	134.07	64.76
11.	Kab. Tapanuli Tengah	75.69	88.05
12.	Kab. Tapanuli Utara	77.45	56.47
13.	Kab. Toba Samosir	102.49	62.75
14.	Kota Binjai	45.93	52.37
15.	Kota Medan	62.76	75.96
16.	Kota Pematang Siantar	79.89	89.72
17.	Kota Sibolga	81.94	34.13
18.	Kota Tanjung Balai	91.18	75.43
19.	Kota Tebing Tinggi	81.65	78.38
20.	Kota Padang Sidempuan	67.60	72.82
21.	Kab. Pakpak Bharat	100.27	53.40
22.	Kab. Nias Selatan	121.68	144.18
23.	Kab. Humbang Hasundutan	82.99	29.81
24.	Kab. Serdang Bedagai	88.24	94.39
25.	Kab. Samosir	82.09	81.46
26.	Kab. Batu Bara	91.53	97.78

27.	Kab. Padang Lawas	60.23	79.26
28.	Kab. Padang Lawas Utara	108.82	102.21
29.	Kab. Labuhanbatu Selatan	82.31	72.55
30.	Kab. Labuhanbatu Utara	95.08	124.79
31.	Kab. Nias Utara	81.45	125.97
32.	Kab. Nias Barat	80.20	52.48
33.	Kota Gunungsitoli	61.33	29.46

Berdasarkan pada tabel 1 ,maka dapat dijelaskan bahwa pada wilayah Kab. Asahan tahun 2023 realisasi PAD sudah tercapai. Sedangkan pada tahun 2024 Anggaran PAD belum tercapai. Sedangkan Kab Dairi tahun 2023-2024 telah mencapai realisasi dan Anggaran PAD sesuai yang direncanakan sedangkan pada wilayah Kab. Deli Serdang, Kab.Karo, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2023.2024 tidak mencapai realisasi dan Anggaran PAD.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Efektivitas Pajak Daerah Dan Kontribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kab di Wilayah Sumut. (Bediona et al., 2022)

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian yang berasal dari bahasa inggris *effective*, sebagai tingkat pencapaian yang ditetapkan suatu kegiatan yang berhasil dengan baik. Efektivitas dapat dilihat dari aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas dan fungsinya.(Pramestya & Graciafernandy, 2023)

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Jenis-jenis Efektivitas

Efektivitas mengukur suatu tindakan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut para ahli Gibson, Ivancecivh, dan Donnely terdapat tiga jenis efektivitas :

- a. Efektivitas Individu
- b. Efektivitas Kelompok
- c. Efektivitas Organisasi

Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah pengaruh penerimaan setiap pajak daerah terhadap pajak daerah dan PAD. Semakin besar hasilnya semakin besar pula peranan pajak daerahh terhadap PAD, sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. (Bediona et al., 2022)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun ke } n}{\text{Realisasi Penerimaan PAD tahun ke } n} \times 100\%$$

Jenis-jenis Retribusi

Retribusi dibagi menjadi tiga bagian kelompok yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Retribusi Jasa Usaha

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (Pratama & Ismunawan, 2023)

Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilaksanakan oleh daerah kepada perseorangan atau badan yang bersifat memaksa dan tanpa imbalan langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berlandaskan aturan undang-undang yang berlaku, dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dan infrastruktur daerah. (Lidya Even Jelista Dima et al., 2025)

Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. (Apriliadewi et al., 2024)

Jenis pajak daerah provinsi : (Swandana, 2021)

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
2. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB)
3. Pajak Rokok

Jenis Pajak daerah kabupaten/kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame

- e. Pajak Penerangan Jalan
- 4. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri Pajak mineral bukan logam dan batuan
Terdapat 2 jenis tarif pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu :
 - a. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%
 - b. Tarif untuk batuan sebesar 20%
- 5. Pajak Parkir
- 6. Pajak air tanah
- 7. Pajak sarang burung walet
- 8. Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan
- 9. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan bentuk penelitian kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif. Dimana bentuk penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang disajikan dalam bentuk angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menganalisis data yang diperoleh dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> yang kemudian ditelaah kembali untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran yang jelas. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian yaitu Laporan Keuangan Daerah di wilayah Sumut terdapat 33 kota/kabupaten wilayah yang digunakan sebagai sampel pada penelitian sebagai pada tabel berikut :

Tabel 2. Sub Wilayah

No	Sub Wilayah
1.	Kab. Asahan
2.	Kab. Dairi
3.	Kab. Deli Serdang
4.	Kab. Karo
5.	Kab. Labuhan Batu
6.	Kab. Langkat
7.	Kab. Mandailing Natal
8.	Kab. Nias

9.	Kab. Simalungun
10.	Kab. Tapanuli Selatan
11.	Kab. Tapanuli Tengah
12.	Kab. Tapanuli Utara
13.	Kab. Toba Samosir
14.	Kota Binjai
15.	Kota Medan
16.	Kota Pematang Siantar
17.	Kota Sibolga
18.	Kota Tanjung Balai
19.	Kota Tebing Tinggi
20.	Kota Padang Sidempuan
21.	Kab. Pakpak Bharat
22.	Kab. Nias Selatan
23.	Kab. Humbang Hasundutan
24.	Kab. Serdang Bedagai
25.	Kab. Samosir
26.	Kab. Batu Bara
27.	Kab. Padang Lawas
28.	Kab. Padang Lawas Utara
29.	Kab. Labuhanbatu Selatan
30.	Kab. Labuhanbatu Utara
31.	Kab. Nias Utara
32.	Kab. Nias Barat
33.	Kota Gunungsitoli

Diwilayah tersebut akan dilakukan analisis untuk Tingkat Efektivitas dan Kotribusi Pajak Daerah dihitung menggunakan rasio yang menggambarkan kemampuan wilayah Sumut, sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria efektivitas

Kriteria	Persentase
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang Efektif
60%	Tidak efektif

Sumber : Kemendagri,2020

Tabel 4 Kriteria Kontribusi

Kriteria	Persentase
≤10%	Sangat kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Cukup
30-40%	Sedang
40-50%	Baik
≥50%	Sangat baik

Sumber : Kemendagri,2020

Hasil

Tingkat Efektivitas di Wilayah Sumut

Tingkat efektivitas dihitung menggunakan rasio yang perbandingannya antara Realisasi dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah. Berikut tabel hasil perhitungan rasio efektivitas yang terdapat pada 33 kota/kabupaten di wilayah Sumut periode 2023-2024 :

Tabel 5 Tingkat Efektivitas

Sub Wilayah	Tahun	Efektivitas	
		Nilai	Kategori
Kab. Asahan	2023	93%	Efektif
	2024	84%	Cukup Efektif
Kab. Dairi	2023	99%	Efektif
	2024	129%	Sangat Efektif
Kab. Deli Serdang	2023	64%	Kurang Efektif
	2024	71%	Cukup Efektif
Kab. Karo	2023	82%	Cukup Efektif
	2024	64%	Kurang Efektif
Kab. Labuhanbatu	2023	82%	Cukup Efektif
	2024	62%	Kurang Efektif
Kab. Langkat	2023	145%	Sangat Efektif
	2024	51%	Tidak Efektif
Kab. Mandailing Natal	2023	105%	Sangat Efektif
	2024	95%	Efektif
Kab. Nias	2023	141%	Sangat Efektif
	2024	90%	Efektif
Kab. Simalungun	2023	76%	Kurang Efektif
	2024	120%	Sangat Efektif
Kab. Tapanuli Selatan	2023	134%	Sangat Efektif
	2024	65%	Kurang Efektif
Kab. Tapanuli Tengah	2023	76%	Kurang Efektif
	2024	88%	Cukup Efektif
Kab. Tapanuli Utara	2023	77%	Kurang Efektif
	2024	56%	Tidak Efektif
Kab. Toba Samosir	2023	102%	Sangat Efektif
	2024	63%	Kurang Efektif
Kota Binjai	2023	46%	Tidak Efektif
	2024	52%	Tidak Efektif
Kota Medan	2023	63%	Kurang Efektif
	2024	76%	Kurang Efektif
Kota Pematang Siantar	2023	80%	Cukup Efektif
	2024	90%	Efektif
Kota Sibolga	2023	82%	Cukup Efektif
	2024	34%	Tidak Efektif
Kota Tanjung Balai	2023	91%	Efektif
	2024	75%	Kurang Efektif
Kota Tebing Tinggi	2023	82%	Cukup Efektif
	2024	78%	Kurang Efektif
Kota Padang Sidempuan	2023	68%	Kurang Efektif
	2024	73%	Kurang Efektif
Kab. Pakpak Bharat	2023	100%	Sangat Efektif
	2024	53%	Tidak Efektif
Kab. Nias Selatan	2023	122%	Sangat Efektif
	2024	144%	Sangat Efektif
Kab. Humbang Hasundutan	2023	83%	Cukup Efektif

	2024	30%	Tidak Efektif
Kab. Serdang Bedagai	2023	88%	Cukup Efektif
	2024	94%	Efektif
Kab. Samosir	2023	82%	Cukup Efektif
	2024	81%	Cukup Efektif
Kab. Batu Bara	2023	92%	Efektif
	2024	98%	Efektif
Kab. Padang Lawas	2023	60%	Kurang Efektif
	2024	79%	Kurang Efektif
Kab. Padang Lawas Utara	2023	109%	Sangat Efektif
	2024	102%	Sangat Efektif
Kab. Labuhanbatu Selatan	2023	82%	Cukup Efektif
	2024	73%	Kurang Efektif
Kab. Labuhanbatu Utara	2023	95%	Efektif
	2024	125%	Sangat Efektif
Kab. Nias Utara	2023	81%	Cukup Efektif
	2024	126%	Sangat Efektif
Kab. Nias Barat	2023	80%	Cukup Efektif
	2024	53%	Tidak Efektif
Kota Gunungsitoli	2023	61%	Kurang Efektif
	2024	29%	Tidak Efektif
Rata-rata Efektivitas di Wilayah Sumut Periode 2023-2024		84%	Cukup Efektif

Sumber : Laporang Keuangan,Data diolah 2025

Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dihitung menggunakan rasio yang perbandingannya antara Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Berikut tabel hasil perhitungan rasio efektivitas yang terdapat pada 33 kota/kabupaten di wilayah Sumut periode 2023-2024 :

Tabel 6 Tingkat Kontribusi pajak daerah

Sub Wilayah	Tahun	Kontribusi Pajak Daerah	
		Nilai	Kategori
Kab. Asahan	2023	20.74%	Kurang Baik
	2024	17.67%	Cukup Kurang
Kab. Dairi	2023	40.70%	Cukup Baik
	2024	13.20%	Cukup Kurang
Kab. Deli Serdang	2023	13,32%	Cukup Kurang
	2024	13.20%	Cukup Kurang
Kab. Karo	2023	17.70%	Cukup Kurang
	2024	16.89%	Cukup Kurang
Kab. Labuhanbatu	2023	30.35%	Baik
	2024	27.54%	Kurang Baik
Kab. Langkat	2023	12.15%	Cukup Kurang
	2024	14.05%	Cukup Kurang
Kab. Mandailing Natal	2023	25.83%	Kurang Baik
	2024	32.99%	Baik
Kab. Nias	2023	12.45%	Cukup Kurang
	2024	26.54%	Kurang Baik
Kab. Simalungun	2023	14.63%	Cukup Kurang
	2024	15.30%	Cukup Kurang
Kab. Tapanuli Selatan	2023	41.48%	Cukup Baik

	2024	59.86%	Sangat Baik
Kab. Tapanuli Tengah	2023	26.62%	Kurang Baik
	2024	32.54%	Baik
Kab. Tapanuli Utara	2023	49.57%	Cukup Baik
	2024	48.83%	Cukup Baik
Kab. Toba Samosir	2023	17.64%	Cukup Kurang
	2024	14.17%	Cukup Kurang
Kota Binjai	2023	15.93%	Cukup Kurang
	2024	13.72%	Cukup Kurang
Kota Medan	2023	11.65%	Cukup Kurang
	2024	11.53%	Cukup Kurang
Kota Pematang Siantar	2023	17.56%	Cukup Kurang
	2024	16.59%	Cukup Kurang
Kota Sibolga	2023	67.53%	Sangat Baik
	2024	80.25%	Sangat Baik
Kota Tanjung Balai	2023	36.75%	Baik
	2024	35.89%	Baik
Kota Tebing Tinggi	2023	24.34%	Kurang Baik
	2024	24.24%	Kurang Baik
Kota Padang Sidempuan	2023	29.67%	Kurang Baik
	2024	36.69%	Baik
Kab. Pakpak Bharat	2023	69.20%	Sangat Baik
	2024	49.89%	Cukup Baik
Kab. Nias Selatan	2023	18.18%	Cukup Kurang
	2024	31.03%	Baik
Kab. Humbang Hasundutan	2023	49.49%	Cukup Baik
	2024	27.49%	Kurang Baik
Kab. Serdang Bedagai	2023	15.14%	Cukup Kurang
	2024	15.57%	Cukup Kurang
Kab. Samosir	2023	30.93%	Baik
	2024	25.18%	Kurang Baik
Kab. Batu Bara	2023	12.66%	Cukup Kurang
	2024	11.79%	Cukup Kurang
Kab. Padang Lawas	2023	21.33%	Kurang Baik
	2024	26.68%	Kurang Baik
Kab. Padang Lawas Utara	2023	24.30%	Kurang Baik
	2024	28.67%	Kurang Baik
Kab. Labuhanbatu Selatan	2023	20.18%	Cukup Kurang
	2024	19.45%	Cukup Kurang
Kab. Labuhanbatu Utara	2023	17.52%	Cukup Kurang
	2024	23.42%	Kurang Baik
Kab. Nias Utara	2023	28.04%	Kurang Baik
	2024	44.94%	Cukup Baik
Kab. Nias Barat	2023	25.51%	Kurang Baik
	2024	28.68%	Kurang Baik
Kota Gunungsitoli	2023	12.99%	Cukup Kurang
	2024	21.06%	Kurang Baik
Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah di Wilayah Sumut Periode 2023-2024		33%	Baik

Sumber : Laporang Keuangan,Data diolah 2025

Pembahasan

Analisis Tingkat Efektivitas di wilayah Sumut

Tingkat efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan hasil analisis, Tingkat efektivitas pada wilayah Sumut rata-rata berada pada kategori cukup efektif dengan persentase 84%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari wilayah Sumut selama tahun pengamatan untuk target dan anggaran sudah sesuai.

Disisi lain, masih terdapat beberapa wilayah yang kurang efektif dan tidak efektif dalam pengelolaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu seperti Kab. Deli Serdang tahun 2023, Kab. Karo tahun 2024, Kab. Labuhanbatu 2024, Kab. Simalungun tahun 2023, Kab. Tapanuli Selatan tahun 2024 dan Kab. Tapanuli Tengah 2023. Sedangkan Kab. Padang Lawas tahun 2023-2024, Kota Gunungsitoli 2023, Kab. Tapanuli Utara tahun 2023, Kab. Toba Samosir tahun 2024, sedangkan Kota Medan tahun 2023-2024, Kota Tanjung Balai tahun 2024, Kota Tebing Tinggi 2024, Kota Padang Sidempuan tahun 2023-2024, dan Kab. Labuhanbatu Selatan tahun 2024 kurang efektif dan tahun 2024 Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Nias Barat, Kota Gunungsitoli tidak tercapainya efektivitas. Sedangkan Kota Binjai pada tahun 2023-2024 tidak tercapainya efektivitas ini dikarenakan pajak daerah yang diterima tidak mencapai target yang ditentukan.

Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah di wilayah Sumut

Berdasarkan hasil analisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah pada wilayah Sumut rata-rata berada pada kategori baik dengan persentase 33%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah yang dibayarkan oleh Masyarakat dari tahun 2023-2024 sudah baik.

Kontribusi Pajak Daerah pada wilayah Sumut sudah dapat dikatakan baik dikarenakan sudah banyak wilayah yang dikategorikan sangat baik dan cukup baik yaitu Kab. Tapanuli Selatan periode 2024, Kab. Pakpak Bharat tahun 2023 dan Kota Sibolga periode 2023-2024 sudah tergolong sangat baik. Sedangkan Kab. Dairi tahun 2023, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Pakpak Bharat tahun 2024, Kab. Humbang Hasundutan tahun 2023, Kab. Nias Utara periode 2024 dan Kab. Tapanuli Utara dari tahun 2023-2024 tergolong cukup baik. Beberapa wilayah yang masih tergolong sangat kurang dan cukup kurang dikarenakan kurangnya kontribusi dari Masyarakat untuk disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di wilayah Sumut pada tahun 2023-2024, maka disimpulkan bahwa Tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Sumut tergolong cukup efektif dengan persentase 80%-90%. Tercapainya Tingkat Efektivitas dikarenakan pajak daerah yang sudah cukup memenuhi target yang ditentukan.

Tingkat Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Sumut juga sudah baik dengan persentase 30%-40%.Tercapainya Tingkat Kontribusi ini juga dikarenakan kesadaran Masyarakat untuk merealisasikan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam membayar pajak disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal (Pemerintah) dimana penyampaian (SPPT) kepada masyarakat kurang maksimal, dan perlu adanya evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan dan pengingkatan kapasitas SDM. Dan faktor internal (Masyarakat) adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh oleh masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta adanya kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat yang mengakibatkan masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pokoknya dibanding memenuhi kewajibannya yaitu mengeluarkan uang untuk membayar pajak. Serta bagi penulis agar untuk penelitian selanjutnya lebih meningkatkan ketelitiannya, baik dalam segi kelengkapan data maupun proses pencarian informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur dengan penghargaan, penulisan Skripsi dengan judul Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kab di Wilayah Sumut. Ini akhirnya dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan di jenjang sarjana pada STMB MULTI SMART. Lebih dari itu, skripsi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, menerapkan ilmu yang telah dipelajari, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian.

Penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dan kontribusi dari banyak pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Simon Kangga Lee, selaku Ketua Yayasan TIME.
2. Ibu Feriani Astuti tarigan, S.Kom., M.Kom., M.M, selaku Ketua STMB MULTI SMART Medan.
3. Ibu Leony Hoki, S.Kom., S.A.B., M.M, selaku Pembantu Ketua I STMB MULTI SMART Medan.
4. Ibu Latersia Br Gurusinga, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Dosen Pembimbing I STMB MULTI SMART Medan.
5. Ibu Fitri Handayani, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II STMB MULTI SMART Medan.
6. Orang tua tercinta(MAMA & BAPAK) serta ADIK tersayang atas cinta, doa, serta dukungan tiada henti yang menjadi sumber semangat terbesar dalam hidup saya.
7. Seluruh Dosen Pengajar STMB MULTISMART Medan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis menjalani aktivitas perkuliahan.
8. Seluruh staff di STMB MULTISMART
9. Teman-teman sekelas Aka-21, sahabat dan saudara. Baik secara langsung maupun tidak langsung,sudah ikut serta membantu dan memberi dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan ini sampai selesai.

Saya memahami bahwa karya ini belum sepenuhnya ideal. Karena itu, masukan dan kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di kemudian hari. Harapannya, karya ini dapat memberikan kegunaan bagi para pembaca dan menjadi kontribusi kecil bagi kemajuan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliadewi, P. M., Manik Sastri, I. D. A. M., & Yudha, C. K. (2024). Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangli. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 5(1), 7–13.
- Arif Bijak Saputro, E., & Masitoh, E. (2020). Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 190–196.
- Bediona, A. T. C., Hidayat, M. T., Bisnis, E., & Surabaya, U. A. (2022). Analisis efektivitas kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017–2020. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 3(2), 117–127.
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2019). *BAB II Kajian Pustaka 2.1. Landasan Teori. NBER Working Papers*, 201(8), 89.

- Dendy Setyawan. (2023). Jurnal ilmu ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2), 88–104.
- Firdaus, M. D. (2022). Tinjauan implementasi revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau tahun 2021, 1, 8–17.
- Jurnal, J., Mea, I., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali periode 2016–2020. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(3), 1900–1911.
- Koli, A. R., Kleruk, S. Y. F., & Lobo, F. (2023). Analisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah Kota Kupang yang diperoleh dari retribusi trayek. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 133–145.
- Lidya Even Jelista Dima, Yohanes Demu, & Maria P. L. Muga. (2025). Analisis efisiensi, efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 235–240. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v3i2.1259>
- Lumbanbatu, M. J., Dewi, K., & Lumbantoruan, S. (2023). Efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Medan. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 256–264. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.207>
- Marcus, G., Dotulong, L. O., & Raintung, M. C. (2023). Pengaruh komunikasi, pemberdayaan pegawai dan pendelegasian wewenang terhadap efektivitas kerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(3), 1074–1086. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i3.50702>
- Marvianto, B. (2021). Analisis kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19 dan sebelum masa pandemi Covid-19. *Bab II Kajian Pustaka*, 2.1, 6–25.
- Naibaho, F., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. (2021). Efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal EMBA*, 9(3), 105–112.
- Pramestya, O. S., & Graciafernandy, M. A. (2023). Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran. *Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 21(2), 631–641.
- Pratama, R. G., & Ismunawan, I. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Surakarta. *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 4(1), 67–78. <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v4i1.202>
- Swandana, E. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Utara pada UPT Samsat Medan Selatan.
- Syamsuddin, S., & Utami, M. A. P. (2021). Efektivitas pembelajaran matematika melalui pendekatan contextual teaching and learning. *Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran*, 1(1), 32–40. <https://doi.org/10.51574/jrip.v1i1.14>